



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
2022**



**DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH  
TAHUN 2021**



**WALIKOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 29 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun

2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3)
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);

20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 46);
21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 15);
22. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 20).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Payakumbuh.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Payakumbuh.
3. Walikota adalah Walikota Payakumbuh.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025, selanjutnya disebut RPJPD Kota Payakumbuh adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5

(lima) tahun.

11. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Struktur Tata Ruang Kota yang mengatur struktur dan pola tata ruang wilayah kota.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
18. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
19. Strategi adalah langkah - langkah berisikan program - program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk

mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berisi satu atau lebih sub-kegiatan untuk menghasilkan keluaran (*output*) atau semi output dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub-kegiatan adalah serangkaian aktivitas pekerjaan atau layanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menghasilkan keluaran (*output*).
24. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
25. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
26. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
27. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
28. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

## **BAB II**

### **RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 merupakan Perencanaan Pembangunan Perangkat

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022.

### **Pasal 3**

- (1) Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 ditetapkan oleh Walikota Payakumbuh.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta sesuai dengan urusan dan kewenangan Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  4. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
  5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  7. Dinas Sosial;
  8. Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian;
  9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  10. Dinas Ketahanan Pangan;
  11. Dinas Lingkungan Hidup
  12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  13. Dinas Perhubungan;
  14. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
  16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  17. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
  18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  19. Dinas Pertanian;
  20. Sekretariat Daerah;

21. Sekretariat DPRD;
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
23. Badan Keuangan Daerah
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25. Inspektorat;
26. Kecamatan Payakumbuh Utara;
27. Kecamatan Payakumbuh Barat;
28. Kecamatan Payakumbuh Timur;
29. Kecamatan Payakumbuh Selatan;
30. Kecamatan Lamposi Tigo Nagori; dan
31. Kantor Kesbangpol.

#### **Pasal 4**

Renja Perangkat Daerah harus memuat program, kegiatan, sub-kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

#### **Pasal 5**

Sistematika dokumen Renja Perangkat Daerah tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran perangkat daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
- e. penutup.

#### **Pasal 6**

Dokumen Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 7**

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
- c. RTRW Kota Payakumbuh; dan
- d. Hasil pelaksanaan musrenbang forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### **Pasal 8**

Penetapan Renja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 bertujuan untuk :

- a. mewujudkan perencanaan teknis Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun ke depan;
- b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar sektor, antar wilayah, antar fungsi maupun tingkatan pemerintahan; dan
- c. sebagai penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Apabila dalam pelaksanaan RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022 mengalami perubahan, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 juga harus mengikuti perubahan tersebut dan akan ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 6 Agustus 2021

  
**WALIKOTA PAYAKUMBUH,**  
  
**RIZA FALEPI**

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 6 Agustus 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,**  
  
  
**RIDA ANANDA**

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 29

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 dapat disusun yang berpedoman pada RPJMD Kota Payakumbuh periode 2017-2022 dan Renstra Perubahan Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang berguna sebagai acuan Rencana Pembangunan Kesejahteraan Sosial. Pembangunan bidang sosial yang akan berjalan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dan telah memberikan manfaat besar terhadap masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Oleh karena itu perencanaan-perencanaan yang konsisten dan berkesinambungan terhadap hak-hak dasar warga masyarakat yang termarginalkan di Kota Payakumbuh adalah menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Perencanaan yang tertuang dalam dokumen ini perlu dicermati dan dipedomani untuk dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait terutama bidang-bidang tugas, sehingga program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dapat tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renja ini, masih terdapat kekurangan, baik dalam pengolahan dan penyajian data. Untuk itu segala saran yang bersifat membangun senantiasa diharapkan demi perbaikan serta penyempurnaan Renja ini dengan harapan Renja yang telah dibuat ini dapat terlaksana tepat waktu, transparan dan akuntabel.

Payakumbuh, Juli 2021

Kepala Dinas Sosial  
Kota Payakumbuh



ERWAN, S.IP  
NIP. 19670310 198903 1 004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	lii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud an Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2020</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial .....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial .....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial.....	11
2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022.....	14
2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	14
<b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL</b>	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	21
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial .....	22
3.3 Program dan Kegiatan .....	24
<b>BAB IV RENCANA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL</b>	
	29
<b>P E N U T U P</b>	
	41

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2020 KOTA PAYAKUMBUH	7
TABEL 2.2 KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH	12
TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2022	15
TABEL 2.4 PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRIORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2021 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022	20
TABEL 2.5 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022	21
TABEL 3.1 TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA HASIL REVIU DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH	23
TABEL 3.2 RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2022	24
TABEL 4.1 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022	37

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2022 yang disusun sebagai bahan acuan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran, dengan sendirinya harus memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang selama 1 (satu) tahun serta memperkirakan keadaan masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan dampak pembangunan yang optimal dalam upaya mewujudkan Visi Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Proses penyusunan Renja Dinas Sosial tahun 2022 berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Sosial tahun 2017-2022.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tertuang dalam dokumen perencanaan tersebut diatas disusun program wajib dan prioritas, dengan mempertimbangkan sumber daya dan faktor-faktor pendukung. Penyusunan Renja SKPD mempunyai arti yang strategis untuk penyelenggaraan program pembangunan yang sistematis, memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Perencanaan yang dibuat merupakan Rencana Kerja Dinas Sosial untuk 1 (satu) tahun.

#### **1.2 Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial berdasarkan pada :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5587),sebgaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032;
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 45);
19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17);

21. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 7);
23. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 23);
24. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 61);
25. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 20 Tahun 2021 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kota Payakumbuh Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2021 Nomor 20);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan renja Dinas Sosial ini dimaksudkan untuk sebagai berikut :

1. Sebagai evaluasi dari pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya yang dijadikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja kedepan
  2. Menetapkan rencana kerja 1 (satu) tahun untuk tahun anggaran berikut sebagai dasar dalam penetapan APBD tahun anggaran berikut
  3. Menetapkan program, kegiatan, tujuan, sasaran dan hasil yang akan dilaksanakan dan dicapai yang dituangkan dalam dokumen renja Dinas Sosial
- Tujuan penyusunan renja Dinas Sosial ini adalah :
1. Pedoman dan acuan dalam penyusunan program dan kegiatan berdasarkan hasil pelaksanaan sebelumnya.

2. Dokumen yang menjadi acuan bagi Dinas Sosial untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam periode 1 (satu) tahun berjalan.
3. Gambaran yang jelas dan terarah mengenai sasaran, tujuan dan hasil yang akan dicapai dari renstra Dinas Sosial yang telah ditetapkan.
4. Menetapkan tujuan dan hasil yang akan dicapai dari rencana kerja dan rencana kerja tahun berikutnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

### **BAB II Hasil Evaluasi Renja Dinas Sosial Tahun lalu**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu- Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh tahun 2022
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Sosial
- 3.3 Program dan Kegiatan

### **BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial**

### **BAB V Penutup**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL TAHUN 2020**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Sosial**

Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2020 yang dituangkan dalam DPA Tahun 2020 berjumlah Rp. 2.230.511.578,- terealisasi sebesar Rp. 1.967.366.208,- atau (88,20%) dengan sisa anggaran terdiri dari :

- a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.371.073.048,- terealisasi sebesar Rp. 2.054.258.269,- (86,63%) sisa sebesar Rp. 316.814.779,-
- b. Belanja Langsung sebesar Rp. 2.230.511.588,- terealisasi sebesar Rp. 1.967.366.208,- (88,20%) sisa sebesar Rp. 263.145.380,-

Belanja langsung tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan sebanyak 8 program dan 31 kegiatan, yang terdiri dari :

1. Sekretariat sebanyak 4 program dengan 17 kegiatan, dukungan dana sebesar Rp. 837.427.990,- terealisasi sebesar Rp. 809.209.873,- (96,63%) sisa sebesar Rp. 28.218.117,-
2. Bidang Rehabilitasi Sosial 2 program 7 kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp.515.513.435,- terealisasi sebesar Rp. 488.010.540,- (94,66%) sisa sebesar Rp 27.502.895,-
3. Bidang Pemberdayaan Sosial 4 program 10 kegiatan, dengan dukungan dana sebesar Rp. 1.393.083.598,- terealisasi sebesar Rp. 1.158.156.335,- (83,13%) sisa sebesar Rp.234.927.263,-

Sesuai dengan penjelasan diatas terlampir dalam format 1 dibawah ini :

Format 1

Tabel 1

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020  
KOTA PAYAKUMBUH

PERANGKAT DAERAH : Dinas Sosial

No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2022 ( Akhir Periode Renstra )		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Renja Tahun 2019		Target Kinerja dan Anggaran Renja Tahun 2020		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Tahun 2020 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan Anggaran Renstra s/d Tahun 2020 (%)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8 = 7/6 X 100%		9 = 5 + 7		10 = 9/4 X 100%	
	<b>Urusan Sosial</b>															
I	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Nilai IKM</b>	100 %	5.146.654.841	100%	2.432.513.490	100%	584.043.303		562.610.848		1.131		2.995.124.338		799
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayar	1387	12.662.825	305 buah	8.895.050	305 buah	2.335.000	305 buah	2.254.600	100	96,56	100	11.149.650	7,2	88
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	72	584.766.000	2 rekening	111.112.863	2 rekening	6.000.000	2 rekening	4.166.686	100	69,44	100	115.279.549	138,9	20
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya	66	1.026.971.850	16 unit	25.944.300	16 unit	9.975.000	16 unit	8.467.700	100	84,89	100	34.412.000	151,5	3
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah pengelola administrasi keuangan yang dibayarkan jasanya	72	471.090.845	24 org	479.396.150	24 org	214.589.190	24 orang	214.223.000	100	99,83	100	693.619.150	138,9	147
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli	120	139.535.393	24 jenis	291.504.259	24 jenis	103.436.405	24 jenis	101.933.917	100	98,55	100	393.438.176	83,3	282
6	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	303	293.256.508	9 jenis	52.375.200	9 jenis	6.618.250	9 jenis	6.591.750	100	99,60	100	58.966.950	33,0	20

7	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	655 8	228.078.762	61 item	41.429.000	61 item	16.832.933	61 item	16.812.350	10 0	99,88	10 0	58.241.350	1,5	26
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, di gandakan dan di jilid	259	130.068.448	11 jenis	43.461.380	11 jenis	9.720.950	11 jenis	9.701.740	10 0	99,80	10 0	53.163.120	38,6	41
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	201	357.602.508	11 item	5.775.900	11 item	2.429.950	11 item	2.424.000	10 0	99,76	10 0	8.199.900	49,8	2
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	140	600.350.450		404.029.900		-		-		-	10 0	404.029.900	71,4	
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	27	132.199.183	730 eksml r	12.190.125	730 eksml r	3.987.625	730 eksml r	3.874.350	10 0	97,16	10 0	16.064.475	370,4	12
12	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	105 16	143.100.219	1459 porsi	55.320.100	1459 porsi	22.980.000	1435 porsi	21.532.200	95	93,70	94	76.852.300	0,9	54
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	303 3	1.026.971.850	92 kali	901.079.263	92 kali	185.138.000	90 kali	170.628.555	95	92,16	94	1.071.707.818	3,1	10 4
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik</b>	<b>100</b>	<b>888.510.530</b>		<b>359.589.353</b>		<b>227.918.527</b>		<b>223.593.425</b>		<b>98,10</b>		<b>583.182.778</b>	0,0	<b>66</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	7	133.000.000	7 unit	-	7 unit	133.000.000	7 unit	133.000.000	10 0	<b>100,0 0</b>	10 0	<b>133.000.000</b>	1428, 6	
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice	66	755.510.530	13 unit	359.589.353	13 unit	94.918.527	16 unit	90.593.425	10 0	95,44	10 0	450.182.778	151,5	60
3	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur kantor yang disediakan	<b>100</b>	-		-								-	0,0	
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap</b>	<b>290</b>	<b>90.111.122</b>		<b>37.844.000</b>		<b>14.850.000</b>		<b>12.600.000</b>		<b>84,85</b>		<b>50.444.000</b>	0,0	<b>56</b>
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapannya yang diadakan	<b>A</b>	90.111.122	31 stel	37.844.000	31 stel	14.850.000	31 stel	12.600.000	10 0	84,85	10 0	50.444.000		56
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat</b>	<b>20</b>	<b>63.760.635</b>		<b>37.382.525</b>		<b>10.616.160</b>		<b>10.405.600</b>		<b>98,02</b>		<b>47.788.125</b>	0,0	<b>75</b>

1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20	31.004.635	4 dokumen	14.918.425	4 dokumen	4.016.585	4 dokumen	3.823.900	100	95,20	100	18.742.325	500,0	60
2	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik yang disusun	20	32.756.000	4 dokumen	22.464.100	4 dokumen	6.599.575	4 dokumen	6.581.700	100	99,73	100	29.045.800	500,0	89
3	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring evaluasi pelaporan yang dilakukan				5.778.900										
<b>V</b>	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya</b>	<b>Persentase Peningkatan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya yang diberdayakan</b>		<b>3.161.028.081</b>		<b>1.926.010.938</b>		<b>334.206.650</b>		<b>325.584.605</b>		<b>97,42</b>		<b>2.251.595.543</b>		<b>71</b>
1	Peningkatan kemampuan ( Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	Jumlah petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS	1506	236.121.917	-	98.025.150	-	-	-	-	-	-	50	98.025.150	3,3	42
2	Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin	Jumlah anggota Kelompok KUBE yang diberi bantuan	235	375.659.501	100 Kelompok	379.506.899	100 Kelompok	18.153.430	100 klp	12.691.930	100	69,91	100	392.198.829	42,6	104
3	Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu	Jumlah pengaduan dan masyarakat miskin yang terlayani	0	939.343.257	73709 jiwa	454.872.882	73709 jiwa	18.464.825	4442 jiwa	15.646.750	60	84,74	65	470.519.632		50
4	Operasional Program Keluarga Harapan	Jumlah penerima operasional PKH	100	1.609.903.406	19 orang	993.606.007	19 orang	297.588.395	19 orang	297.245.925	100	99,88	100	1.290.851.932	100,0	80
<b>VI</b>	<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase meningkatnya keterampilan anak cacat, anak terlantar termasuk anak jalanan dan anak nakal</b>		<b>4.002.047.546</b>		<b>2.190.944.835</b>		<b>721.359.587</b>		<b>548.247.723</b>		<b>76,00</b>		<b>2.739.192.558</b>		<b>68</b>
1	Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak cacat dan anak nakal yang mengikuti pelatihan	395	365.442.000	10 orang	188.622.825	10 orang	12.570.305	28 orang	12.169.305	100	96,81	100	200.792.130	25,3	55
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS	Jumlah penerima Rastra/ BPNT/ Sembako yang termasuk dalam BDT	34470	703.781.008	5745 orang	513.578.775	5745 orang	40.281.050	6476 orang	40.114.050	90	99,59	90	553.692.825	0,3	79

3	Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Jumlah Data PMKS, PBDT dan PBI JKN yang terverifikasi dan terverifikasi	363 444	2.610.254.038	2 kali	1.020.370.60 4	2 kali	463.153.497	1 kali	317.369.058	50	68,52	85	1.337.739.662	0,0	51
4	Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa	Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani	300	322.570.500	38 orang	202.069.547	38 orang	90.487.635	25 orang	67.981.815	86	75,13	88	270.051.362	29,3	84
5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah monitoring evaluasi pelaporan yang dilakukan			2 Kegiatan	18.939.100							10 0	18.939.100	100,0	10 0
6	Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP	Jumlah lansia potensial yang dibantu / menerima UEP	500	517.226.348	4 orang	247.363.984	4 orang	83.349.905	4 orang	83.124.905	10 0	99,73	60	330.488.889	12,0	64
7	Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia	Jumlah Lansia terlantar yang menerima bantuan permakanaan	90	120.658.451	7 orang		7 orang	13.419.130	7 orang	13.247.825	10 0	98,72	10 0	13.247.825	111,1	11
8	Pembinaan dan bantuan perbaikan Gizi bagi anak terlantar diluar Panti	Jumlah anak terlantar yang menerima bantuan perbaikan Gizi	15	60.658.451	5 orang		5 orang	10.070.005	5 orang	9.802.705	10 0	97,35	10 0	9.802.705	666,7	16
9	Pemulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis luar daerah ke daerah asal	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis yang dapat dijangkau atau dipulangkan	60	61.325.564	20 orang		20 orang	8.028.060	31 orang	4.438.060	10 0	55,28	10 0	4.438.060	166,7	7
<b>VII</b>	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Persentase meningkatnya kelembagaan Kesejahteraan Sosial</b>		<b>2.736.918.72 4</b>		<b>2.446.405.7 38</b>		<b>264.764.830</b>		<b>217.184.242</b>		<b>82,03</b>		<b>2.663.589.98 0</b>		<b>97</b>
1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Jumlah pelaksanaan seleksi pilar-pilar sosial berprestasi	750	2.089.531.211	150 orang	1.489.843.12 7	150 orang	200.019.750	151 orang	156.676.050	10 0	78,33	90	1.646.519.177	12,0	79
2	Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Jumlah pembentukan posdaya/WK SBM dan layanan LK3	400	325.955.113	150 orang	192.559.338	150 orang	34.070.650	-	33.639.142	80	98,73	85	226.198.480	21,3	69
3	Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Jumlah pelaksanaan sarasehan, temu ramah dan napak tilas kepahlawanan	10	321.432.400	2 kegiatan	237.700.470	2 kegiatan	30.674.430	2 kegiatan	26.869.050	10 0	87,59	85	264.569.520	850,0	82
	Pemberdayaan Karang Taruna	Jumlah pembinaan Karang Taruna	0	635.812.184	-	526.302.803	-	-	0	-						

<b>VII I</b>	<b>Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP</b>	<b>Persentase terpeliharaan ya sarana dan prasarana TMP dan makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar yang berhasil dilaksanakan</b>		430.176.240		289.705.300		72.752.531		67.139.765		92,29		356.845.065		83
1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang diperlukan	15	430.176.240	2 lokasi	289.705.300	2 lokasi	72.752.531	2 lokasi	67.139.765	100	92,29	100	356.845.065	666,7	83
<b>TOTAL</b>				<b>16.519.207.719</b>		<b>9.720.396.179</b>		<b>2.230.511.588</b>	-	<b>1.967.366.208</b>	-	88,20		<b>11.687.762.387</b>		<b>71</b>

Berdasarkan tabel diatas ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target, sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Rendahnya realisasi keuangan pada kegiatan ini disebabkan karena pembayaran 4 rekening tersebut mengalami penurunan tagihan dari yang dianggarkan untuk 12 bulan pada DPA Dinas Sosial Kota Payakumbuh.
2. Kegiatan Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin, Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena pandemi Covid-19, sehingga tidak bisa melaksanakan pelatihan bimbingan sosial.
3. Kegiatan Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu, Rendahnya capaian indikator kegiatan dikarenakan pengaduan pada SLRT berkurang dari biasanya karena dalam masa pandemi, dinsos menyarankan untuk menyampaikan pengaduannya lewat aplikasi Whatsapp.
4. Kegiatan Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, Rendahnya realisasi pada kegiatan ini disebabkan karena pandemi Covid-19 dimana verifikasi data yang biasanya dilakukan 2 kali dalam satu tahun hanya dilakukan 1 kali pada tahun 2020.
5. Kegiatan Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa, Rendahnya realisasi kegiatan ini disebabkan karena kegiatan ini bersifat situasional dan tidak dapat diprediksikan.

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

Dalam melaksanakan kebijaksanaan teknis Kepala Dinas dibantu oleh seorang Sekretaris, 2 (dua) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kasubag, 6 (enam) orang Kepala Seksi, yang dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi yang telah ditetapkan yaitu

1. **Sekretaris** mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
2. **Kasubag Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
3. **Kasubag Program dan Keuangan** mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan program dan keuangan lingkup Dinas.

4. **Kabid Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial.
5. **Kabid Pemberdayaan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Sosial.
6. **Kasi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Kepahlawanan, Kesetiakawanan Sosial dan Restorasi Sosial.
7. **Kasi Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Potensi Sumber dan Pengawasan.
8. **Kasi Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Sosial, Keluarga dan Masyarakat.
9. **Kasi Rehabilitasi Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Rehabilitasi Sosial.
10. **Kasi Perlindungan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perlindungan Sosial.
11. **Kasi Jaminan Sosial** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Jaminan Sosial.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi diatas, Capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2020 berdasarkan kepada indikator kinerja umum yang telah ditetapkan sebagai mana ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana dapat dilihat pada lampiran renja ini (Format 2)

**Tabel 2**  
**KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

**PERANGKAT DAERAH : DINAS SOSIAL**

NO	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	IKU	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian				Proyeksi		Catatan Analisis
						2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Tingkat Kemiskinan	√	√	√		6,20	5,93%	5,66%	5,39%	5,88%	5,77%	5,68	5,45%	5,41%	5,27%	
	Persentase RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang keluar dari basis data terpadu	√	√	√		0,53%	1,95%	0,60%	0,60%	0,53%	1,95%	7,93	13,81%	0,80%	1,00%	
	Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial		√	√		B	BB	A	A	B	B	A	A	A	A	
	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesos		√	√		45,55%	92,57%	48%	60%	45,55%	92,57%	66,66	100	65%	70%	
	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	√	√	√		98,00	101,64	99,60	99,80	98,00	101,64	98,85	125,38	99,9	100	

### **2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial**

Dinas Sosial sebagai perangkat/lembaga teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang sosial dengan mengacu kepada SPM bidang Sosial dan RPJMD Kota Payakumbuh.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan berkaitan dengan belum optimalnya kualitas dinas sosial yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

- Masih relatif tingginya angka Kemiskinan;
- Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS;
- Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- Masih Belum optimalnya Perlindungan dan Jaminan sosial bagi Kelompok rentan dan PMKS lainnya ;

Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Sosial dalam pelaksanaan pelayanan di bidang sosial sebagai berikut :

- Belum Optimalnya peran dari PSKS dalam mensosialisasikan program-program bantuan yang ada di Dinas Sosial;
- Masih relatif rendahnya kualitas dari PSKS sehingga butuh adanya pelatihan-pelatihan bagi PSKS;
- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan;
- Belum optimalnya penanganan Bencana dari tim cepat tanggap bencana ;
- Masih diperlukannya nilai-nilai kesetiakawanan Sosial pada masyarakat kota Payakumbuh
- Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program sosial;
- Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang melakukan verifikasi maupun verifikasi data untuk menerima bantuan-bantuan sosial;

Sedangkan ancaman pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam pelaksanaan pelayanan antara lain :

- Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelayakan menerima bantuan
- Masih banyak aparat pemerintah yang belum memahami program sosial
- Adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah yang melakukan verifikasi maupun verifikasi data untuk menerima bantuan-bantuan sosial

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebelumnya dapat ditentukan isu-isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

1. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial
2. Belum optimalnya tingkat capaian kinerja sosial
3. Belum optimalnya kualitas PSKS

#### **2.4 Review terhadap RKPD Kota Payakumbuh Tahun 2022**

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2022 berkaitan dengan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022. Rumusan kebutuhan program dan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, target/tolak ukur dan dana yang dibutuhkan terlampir dalam format 3.

Berkaitan dengan keselarasan antara Rencana Kerja Dinas Sosial 2022 dengan RKPD tahun 2022 antara lain :

- a. Penyesuaian Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- b. Penyesuaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019
- c. Penyesuaian Pagu Indikatif Renja Dinas Sosial 2021 dengan Pagu Indikatif yang telah ditetapkan dalam RKPD 2022
- d. Penyesuaian Indikator dan Tolak Ukur berupa :
  - Capaian Program
  - Keluaran (Output)
  - Hasil (Outcome)
  - Kelompok Sasaran Kegiatan
- e. Target Kinerja

#### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang berpedoman kepada Renstra Dinas untuk 1 tahun kedepan dilakukan dengan memperhatikan usulan pemangku kepentingan pada waktu musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan dan Forum OPD terkait dengan pelayanan yang akan dilakukan kepada masyarakat. Selanjutnya usulan

pemangku kepentingan tersebut disesuaikan dengan isu- isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial.

Daftar usulan program dan kegiatan yang di usulkan masyarakat disajikan dalam bentuk persandingan hasil musrenbang kecamatan dengan Renja Dinas Sosial pada lampiran (Format 4a dan 4b)

Format 3

**Tabel 3**  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2022					Hasil Analisis					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Pagu Indikatif(Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Pencapaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				4.375.983.015	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				3.790.000.000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Payakumbuh	Nilai IKM Dinsos	91	3.397.105.255	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Payakumbuh	Nilai IKM Dinsos	91	3.137.961.870	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100	66.190.342	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100	52.911.133	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen OPD yang disusun	8 dokumen	59.908.454	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen OPD yang disusun	8 dokumen	46.928.383	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Payakumbuh	Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPJ,	5 dokumen	4.183.452	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Kota Payakumbuh	Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPJ,	5 dokumen	3.984.240	

	Kinerja SKPD		EKPPD dan laporan bulanan			Kinerja SKPD		EKPPD dan laporan bulanan			
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	4 dokumen	2.098.436	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Payakumbuh	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	4 dokumen	1.998.510	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan</b>	<b>85</b>	<b>2.527.294.694</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan</b>	<b>85</b>	<b>2.406.947.328</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Payakumbuh	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	23 orang	2.527.294.694	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Payakumbuh	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	23 orang	2.406.947.328	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar</b>	<b>100</b>	<b>15.225.000</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar</b>	<b>100</b>	<b>16.470.920</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Payakumbuh	Jumlah pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan	31 stel	15.225.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Payakumbuh	Jumlah pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan	31 stel	16.470.920	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>306.909.315</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>184.145.405</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli	26 buah	3.709.293	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli	26 buah	3.532.660	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis	10.500.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	85 item	30.727.436	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	85 item	29.264.225	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Payakumbuh	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 jenis	13.808.288	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Payakumbuh	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 jenis	13.150.750	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Payakumbuh	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	365 eksemplar	4.303.898	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Payakumbuh	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	365 eksemplar	4.098.950	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Payakumbuh	Jumlah porsi nasi dan snak yang disediakan	1208 porsi	121.930.200	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kota Payakumbuh	Jumlah porsi nasi dan snak yang disediakan	1208 porsi	2.100.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Payakumbuh	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	20 kali	121.930.200	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Payakumbuh	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	20 kali	121.998.820	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan</b>	<b>100</b>	<b>320.489.404</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan</b>	<b>100</b>	<b>305.228.004</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Payakumbuh	Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	205 buah	1.646.148	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Payakumbuh	Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	205 buah	1.567.760	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Payakumbuh	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	6 rekening	11.336.766	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Payakumbuh	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	6 rekening	10.796.920	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan	11 orang	307.506.490	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Payakumbuh	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan	11 orang	292.863.324	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik</b>	<b>100</b>	<b>160.996.500</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik</b>	<b>100</b>	<b>172.259.080</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Payakumbuh	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diperbaiki dan diservis	1 unit	41.149.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Payakumbuh	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diperbaiki dan diservis	1 unit	39.190.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Payakumbuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12 unit	111.037.500	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Payakumbuh	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12 unit	122.800.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Payakumbuh	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	8.809.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Payakumbuh	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit	10.269.080	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>70</b>	<b>246.367.927</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>70</b>	<b>118.816.120</b>	

<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya</b>	<b>100</b>	<b>246.367.927</b>	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya</b>	<b>100</b>	<b>118.816.120</b>
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	150 orang	145.563.737	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	150 orang	30.632.130
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	5 orang	5.150.586	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	5 orang	4.905.320
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah LKKS yang dibina	10 lembaga	52.984.722	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah LKKS yang dibina	10 lembaga	50.461.640
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah karang taruna yang dibina	47 kelurahan	15.839.796	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah karang taruna yang dibina	47 kelurahan	11.585.520
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan	Kota Payakumbuh	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	10 keluarga	26.829.086	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan	Kota Payakumbuh	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	10 keluarga	21.231.510

	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)					
III	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS</b>	<b>99,9</b>	<b>128.222.841</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS</b>	<b>99,9</b>	<b>210.953.740</b>	
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial</b>	<b>80</b>	<b>128.222.841</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial</b>	<b>80</b>	<b>99.961.310</b>	
	Penyediaan Permakanan	Kota Payakumbuh	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	15 orang	78.837.696	Penyediaan Permakanan	Kota Payakumbuh	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	15 orang	75.083.520	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang	20 orang	6.816.044	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang	20 orang	17.119.470	

			terlantar yang ditangani					terlantar yang ditangani			
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Payakumbuh	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan	5 orang	8.146.236	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Payakumbuh	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan	5 orang	7.758.320	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan bantuan UEP permakanan	5 orang	17.337.443	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan bantuan UEP permakanan	5 orang	-	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Payakumbuh	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Payakumbuh	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali		
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi (tertangani)	10 orang	17.085.422	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi (tertangani)	10 orang	-	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Payakumbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	200 jiwa		Pemberian Layanan Rujukan	Kota Payakumbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	200 jiwa		

	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial</b>	<b>80</b>	-	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial</b>	<b>80</b>	<b>110.992.430</b>	
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	19 orang	-	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	19 orang	110.992.430	
<b>IV</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)</b>	<b>100</b>	<b>463.857.734</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)</b>	<b>100</b>	<b>244.360.520</b>	
	<b>Pemeliharaan Anak-anak terlantar</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase anak terlantar yang ditangani, dirujuk dan dipantau</b>	<b>100</b>	-	<b>Pemeliharaan Anak-anak terlantar</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase anak terlantar yang ditangani, dirujuk dan dipantau</b>	<b>100</b>	-	
	Penjangkauan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di tangani	5 orang		Penjangkauan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di tangani	5 orang		
	Rujukan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di rujuk	5 orang		Rujukan Anak-anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di rujuk	5 orang		
	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di pantau	5 orang		Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Kota Payakumbuh	Jumlah anak terlantar yang di pantau	5 orang		
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase Pengaduan yang ditindak</b>	<b>100</b>	<b>463.857.734</b>	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase Pengaduan yang ditindak</b>	<b>100</b>	<b>244.360.520</b>	

	Daerah Kabupaten/ Kota		lanjuti			Daerah Kabupaten/ Kota		lanjuti			
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali	172.532.808	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali	164.316.960	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	1200 jiwa	97.502.874	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	1200 jiwa	57.859.880	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	3500 KK	193.822.052	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Payakumbuh	Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	3500 KK	22.083.680	
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti	2 kelompok	-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Payakumbuh	Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti	2 kelompok	100.000	-
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase korban bencana yang tetangani</b>	<b>100</b>	<b>107.329.299</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase korban bencana yang tetangani</b>	<b>100</b>	<b>47.859.880</b>	
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>107.329.299</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>47.859.880</b>	
	Penyediaan Makanan	Kota Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	20 kejadian	91.159.299	Penyediaan Makanan	Kota Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	20 kejadian	47.859.880	

	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	8 orang	5.670.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Payakumbuh	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	8 orang	-	
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Payakumbuh	Jumlah kelompok rentan yang dilayani	8 orang	10.500.000	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Kota Payakumbuh	Jumlah kelompok rentan yang dilayani	8 orang	-	
VI	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan</b>	<b>100</b>	<b>33.099.959</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan</b>	<b>100</b>	<b>30.047.870</b>	
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45</b>	<b>100</b>	<b>33.099.959</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	Kota Payakumbuh	<b>Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45</b>	<b>100</b>	<b>30.047.870</b>	
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	2 lokasi	31.439.100	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	2 lokasi	28.466.100	
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	2 lokasi	1.660.859	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Kota Payakumbuh	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	2 lokasi	1.581.770	

Format 4.a

Format 4.a

PERSANDINGAN DAFTAR KEGIATAN PRORITAS HASIL MUSRENBANG KECAMATAN TAHUN 2020 DENGAN RANCANGAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022  
KECAMATAN PAYAKUMBUH UTARA

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

Hasil Musrenbang Kecamatan Tahun 2020					Kegiatan Sesuai Renja Perangkat Daerah Tahun 2021		
NO	Kegiatan Prioritas	Lokasi (Kelurahan)	Indikator Kinerja	Volume	Kegiatan Rancangan Renja Tahun 2020	Pagu Indikatif Tahun 2020	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8

Nihil

Format 4b

Table 4 b

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2022  
KOTA PAYAKUMBUH

NO	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	<b>Nihil</b>				

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL**

#### **3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan nasional yang dikaitkan dengan visi dan misi Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :

1. Membangun Indonesia dari Pinggiran memfokuskan pada Penanggulangan Kemiskinan dengan sasaran Meningkatkan penjangkauan pelayanan dasar, perlindungan sosial, serta pengembangan kawasan.
2. Meningkatkan Kualitas hidup Manusia dan Masyarakat Indonesia dengan Memfokuskan pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penghidupan yang berkelanjutan dengan sasaran.
  - a. Terfasilitasinya sebanyak mungkin rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh program pengembangan penghidupan yang berkelanjutan.
  - b. Terbentuknya Kelembagaan Pendampingan di daerah sebagai media untuk meningkatkan kapasitas dan keterampilan penduduk miskin dan rentan.
  - c. Terbentuknya kelompok- kelompok masyarakat produktif di kantong- kantong kemiskinan tingkat kecamatan sebagai media untuk pembangunan masyarakat miskin dan rentan.
3. Arah kebijakan nasional lainnya terkait dengan Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
  - a. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah serta penguatan pengawasan dan pemantapan SAKIP.
  - b. Peningkatan kualitas Pelayanan publik.
  - c. Internalisasi pengurangan resiko bencana.
  - d. Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana.
  - e. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- f. Peningkatan permasyarakatan budaya produksi melalui pembuatan barang dan jasa yang dapat dilakukan sendiri.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial**

Penyusunan Renja Dinas Sosial Kota Payakumbuh berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh.

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Sosial terutama merevisi indikator kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indikator juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2017-2022.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana Strategis Dinas Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh antara lain:

1. Rekomendasi Bappeda Kota Payakumbuh

- Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus masing-masing.
- Indikator agar disesuaikan dengan cascading perangkat daerah.

2. Rekomendasi Narasumber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Penggabungan beberapa indikator menjadi indikator yang dapat menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum Dinas
- Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan
- Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria yang lainnya
- Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja
- Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala seksi dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian kinerja.

Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Sosial tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu**  
**Dinas Sosial Kota Payakumbuh**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Kinerja Tahun 2016	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN TAHUN						
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Meningkatnya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)		Tingkat Kemiskinan	6,46%	5,88%	5,77%	5,68%	5,54%	5,41%	5,27%	
		1.Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu.	0,20%	0,53%	1,95%	7,93%	0,60%	0,80%	1,00%	
		2.Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	a. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.	40%	45,55%	92,57%	66,66%	60%	65%	70%	
			b. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,20%	98,00%	101,64 %	98,85%	98,80%	99,90 %	100%	
		3. Meningkatkan Aksi Sosial.	a. Persentase Peringatan Hari Besar Kepahlawanan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase Penerapan Peringatan Kesetiakawanan Sosial dalam Penanganan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2.Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	CC	B	BB	A	A	A	A	

### 3.3. Program dan Kegiatan

#### a. Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Perumusan Program dan Kegiatan (Format 5) antara lain :

##### 1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah khususnya Misi 1 yaitu “ Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Handal, Sehat dan Kompetitif “ dengan sasaran menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran di Kota Payakumbuh. Sasaran ini dicapai dengan strategi meningkatkan peran seluruh elemen dalam pengentasan kemiskinan.

##### 2. Pencapaian SDGs

Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung pencapaian tujuan 1 ( satu ) SDGs yaitu: menanggulangi kemiskinan.

##### 3. Pengentasan Kemiskinan

Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat Mendukung Program pengentasan Kemiskinan yang sudah merupakan program prioritas di Renstra dan Renja Dinas Sosial.

##### 4. Pencapaian SPM

Penyusunan Program dan kegiatan pada Dinas Sosial sangat mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial

#### b. Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Pada tahun 2022 pada Dinas Sosial terdapat 6 Program, 13 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan lokasi menyebar di seluruh kecamatan dan kelurahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Total kebutuhan dana menurut sumber pendanaan :

- Sumber APBD Kota Payakumbuh : Rp. 3.790.000.000,-

Selanjutnya rincian program dan kegiatan menurut sumber pendanaan APBD Kota, APBN dan APBD Propinsi dapat dilihat pada lampiran 5.

Format 5

**Tabel 5**  
**RUMUSAN RENCANA DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023**  
**KOTA PAYAKUMBUH**

Perangkat Daerah : Dinas sosial

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>				<b>3.790.000.000</b>				<b>4.085.707.523</b>
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	Nilai IKM Dinsos	Kota Payakumbuh	91	3.137.961.870	DAU		91	3.295.565.478
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	Kota Payakumbuh	100	52.911.133	DAU		100	55.556.690
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen OPD yang disusun	Kota Payakumbuh	8 dokumen	46.928.383	DAU		8 dokumen	49.274.802
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPJ, EKPPD dan laporan bulanan	Kota Payakumbuh	5 dokumen	3.984.240	DAU		5 dokumen	4.183.452
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	Kota Payakumbuh	4 dokumen	1.998.510	DAU		4 dokumen	2.098.436
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan	Kota Payakumbuh	85	2.406.947.328	DAU		85	2.527.294.694
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	Kota Payakumbuh	23 orang	2.406.947.328	DAU		23 orang	2.527.294.694
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar	Kota Payakumbuh	100	16.470.920	DAU		100	18.000.000

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan	Kota Payakumbuh	31 stel	16.470.920	DAU		31 stel	18.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100</b>	<b>184.145.405</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>193.352.656</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli	Kota Payakumbuh	26 buah	3.532.660	DAU		26 buah	3.709.293
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	Kota Payakumbuh	1 jenis	10.000.000	DAU		1 jenis	10.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	Kota Payakumbuh	85 item	29.264.225	DAU		85 item	30.727.436
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	Kota Payakumbuh	12 jenis	13.150.750	DAU		12 jenis	13.808.268
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	365 eksemplar	4.098.950	DAU		365 eksemplar	4.303.898
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah porsi nasi dan snak yang disediakan	Kota Payakumbuh	1208 porsi	2.100.000	DAU		1208 porsi	2.205.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	Kota Payakumbuh	20 kali	121.998.820	DAU		20 kali	128.098.761
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	100	305.228.004	DAU		100	320.489.404
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	Kota Payakumbuh	205 buah	1.567.760	DAU		205 buah	1.646.148
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	6 rekening	10.796.920	DAU		6 rekening	11.336.766
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan	Kota Payakumbuh	11 orang	292.863.324	DAU		11 orang	307.506.490
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100</b>	<b>172.259.080</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>180.872.034</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diperbaiki dan diservis	Kota Payakumbuh	1 unit	39.190.000	DAU		1 unit	41.149.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	Kota Payakumbuh	12 unit	122.800.000	DAU		12 unit	128.940.000

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Kota Payakumbuh	10 unit	10.269.080	DAU		10 unit	10.782.534
<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>70</b>	<b>118.816.120</b>	<b>DAU</b>		<b>70</b>	<b>124.756.927</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100</b>	<b>118.816.120</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>124.756.927</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	Kota Payakumbuh	150 orang	30.632.130	DAU		150 orang	32.163.737
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	Kota Payakumbuh	5 orang	4.905.320	DAU		5 orang	5.150.586
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKKS yang dibina	Kota Payakumbuh	10 lembaga	50.461.640	DAU		10 lembaga	52.984.722
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah karang taruna yang dibina	Kota Payakumbuh	47 kelurahan	11.585.520	DAU		47 kelurahan	12.164.796
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	Kota Payakumbuh	10 keluarga	21.231.510	DAU		10 keluarga	22.293.086
<b>III</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>99,9</b>	<b>210.953.740</b>	<b>DAU</b>		<b>99,9</b>	<b>279.501.428</b>
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>80</b>	<b>99.961.310</b>	<b>DAU</b>		<b>80</b>	<b>162.959.376</b>
	Penyediaan Perumahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan perumahan	Kota Payakumbuh	15 orang	75.083.520	DAU		15 orang	78.837.696

	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang terlantar yang ditangani	Kota Payakumbuh	20 orang	17.119.470	DAU		20 orang	17.975.444
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan	Kota Payakumbuh	5 orang	7.758.320	DAU		5 orang	8.146.236
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan bantuan UEP permakanan	Kota Payakumbuh	5 orang	-	DAU		5 orang	20.000.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	Kota Payakumbuh	2 kali		DAU		2 kali	10.000.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi (tertangani)	Kota Payakumbuh	10 orang	-	DAU		10 orang	18.000.000
	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	Kota Payakumbuh	200 jiwa		DAU		200 jiwa	10.000.000
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>80</b>	<b>110.992.430</b>	<b>DAU</b>		<b>80</b>	<b>116.542.052</b>
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	Kota Payakumbuh	19 orang	110.992.430	DAU		19 orang	116.542.052
<b>IV</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>	<b>Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100</b>	<b>244.360.520</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>306.473.546</b>
	<b>Pemeliharaan Anak-anak terlantar</b>	<b>Persentase anak terlantar yang ditangani, dirujuk dan dipantau</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100</b>	<b>-</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>30.000.000</b>
	Penjangkauan Anak-anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang ditangani	Kota Payakumbuh	5 orang		DAU		<b>5 orang</b>	<b>10.000.000</b>
	Rujukan Anak-anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Kota Payakumbuh	5 orang		DAU		<b>5 orang</b>	<b>10.000.000</b>
	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar	Jumlah anak terlantar yang dipantau	Kota Payakumbuh	5 orang		DAU		<b>5 orang</b>	<b>10.000.000</b>
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti	Kota Payakumbuh	100	244.360.520	DAU		100	276.473.546
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan verivali data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	Kota Payakumbuh	2 kali	164.316.960	DAU		2 kali	172.532.808

	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	Kota Payakumbuh	1200 jiwa	57.859.880	DAU		1200 jiwa	60.752.874
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	Kota Payakumbuh	3500 KK	22.083.680	DAU		3500 KK	23.187.864
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti	Kota Payakumbuh	2 kelompok	100.000	DAU		2 kelompok	20.000.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Persentase korban bencana yang tetangani</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100</b>	<b>47.859.880</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>47.859.880</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100</b>	<b>47.859.880</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>47.859.880</b>
	Penyediaan Makanan	Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	Kota Payakumbuh	20 kejadian	47.859.880	DAU		20 kejadian	50.252.874
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	Kota Payakumbuh	8 orang	-	DAU		8 orang	7.000.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang dilayani	Kota Payakumbuh	8 orang	-	DAU		8 orang	12.000.000
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100</b>	<b>30.047.870</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>31.550.264</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan Pejuang 45</b>	<b>Kota Payakumbuh</b>	<b>100</b>	<b>30.047.870</b>	<b>DAU</b>		<b>100</b>	<b>31.550.264</b>
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	Kota Payakumbuh	2 lokasi	28.466.100	DAU		2 lokasi	29.889.405
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	Kota Payakumbuh	2 lokasi	1.581.770	DAU		2 lokasi	1.660.859

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS SOSIAL

Usulan rencana program dan kegiatan Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2022 dengan sumber dana DAU Tahun 2022 sesuai pagu indikatif sementara Tahun 2022, format terlampir.

#### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022

#### SUMBER DANA DAU KOTA PAYAKUMBUH

##### Perangkat Daerah ; Dinas Sosial

NO	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan	Prioritas Daerah	Indikator Kinerja						Dana Indikatif 2022	Prakiraan Maju Tahun 2023
			Capaian Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan			
			Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL								3.790.000.000	4.085.707.523
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai IKM Dinsos	91					3.137.961.870	3.295.565.478
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						Persentase ketersediaan dokumen perangkat daerah	100	52.911.133	55.556.690
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah dokumen OPD yang disusun	8 dokumen			46.928.383	49.274.802
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPJ, EKPPD dan laporan bulanan	5 dokumen			3.984.240	4.183.452

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun	4 dokumen			1.998.510	2.098.436
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>						<b>Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan</b>	<b>85</b>	<b>2.406.947.328</b>	<b>2.527.294.694</b>
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan	23 orang			2.406.947.328	2.527.294.694
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>						<b>Persentase Layanan Kepegawaian ASN Dinas Sosial yang sesuai Standar</b>	<b>100</b>	<b>16.470.920</b>	<b>18.000.000</b>
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Jumlah pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang diadakan	31 stel			16.470.920	18.000.000
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>						<b>Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar</b>	<b>100</b>	<b>184.145.405</b>	<b>193.352.656</b>
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli	26 buah			3.532.660	3.709.293
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang dibeli	1 jenis			10.000.000	10.500.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli	85 item			29.264.225	30.727.436
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	12 jenis			13.150.750	13.808.268
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan				Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan	365 eksemplar			4.098.950	4.303.898

	Perundang-undangan									
	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Jumlah porsi nasi dan snak yang disediakan	1208 porsi			2.100.000	2.205.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan	20 kali			121.998.820	128.098.761
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan</b>	<b>100</b>	<b>305.228.004</b>	<b>320.489.404</b>
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat				Jumlah benda pos dan cek giro yang dibeli	205 buah			1.567.760	1.646.148
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan	6 rekening			10.796.920	11.336.766
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan	11 orang			292.863.324	307.506.490
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>						<b>Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik</b>	<b>100</b>	<b>172.259.080</b>	<b>180.872.034</b>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diperbaiki dan diservis	1 unit			39.190.000	41.149.500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	12 unit			122.800.000	128.940.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	10 unit			10.269.080	10.782.534

<b>II</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>		<b>Persentas e PSKS yang berdaya dalam penyeleng garaan Kesejahte raan Sosial</b>	<b>70</b>					<b>118.816.120</b>	<b>124.756.927</b>
	<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>						<b>Persentas e PSKS yang berjalan sesuai fungsinya</b>	<b>100</b>	<b>118.816.120</b>	<b>124.756.927</b>
	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina	150 orang			30.632.130	32.163.737
	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang dibina	5 orang			4.905.320	5.150.586
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah LKKS yang dibina	10 lemba ga			50.461.640	52.984.722
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				Jumlah karang taruna yang dibina	47 kelura han			11.585.520	12.164.796
	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)				Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3	10 keluar ga			21.231.510	22.293.086
<b>III</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>		<b>Persentas e PMKS yang tertangan i oleh</b>	<b>99,9</b>					<b>210.953.740</b>	<b>279.501.428</b>

			PSKS							
	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>						<b>Persentase PMKS yang mendapat Rehabilitasi Sosial</b>	<b>80</b>	<b>99.961.310</b>	<b>162.959.376</b>
	Penyediaan Permakanan				Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanan	15 orang			75.083.520	78.837.696
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga				Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis / mayat terlantar dan orang terlantar yang ditangani	20 orang			17.119.470	17.975.444
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial				Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan	5 orang			7.758.320	8.146.236
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat				Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan bantuan UEP permakanan	5 orang			-	20.000.000
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan				Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan	2 kali				10.000.000
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi	10 orang			-	18.000.000

					(tertangani)					
	Pemberian Layanan Rujukan				Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	200 jiwa				10.000.000
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>						<b>Persentase PMKS yang mendapatkan Jaminan Sosial</b>	<b>80</b>	<b>110.992.430</b>	<b>116.542.052</b>
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga				Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi	19 orang			110.992.430	116.542.052
<b>IV</b>	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>		<b>Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)</b>	<b>100</b>					<b>244.360.520</b>	<b>306.473.546</b>
	<b>Pemeliharaan Anak-anak terlantar</b>						<b>Persentase anak terlantar yang ditangani, dirujuk dan dipantau</b>	<b>100</b>	-	<b>30.000.000</b>
	Penjangkauan Anak-anak terlantar				Jumlah anak terlantar yang ditangani	5 orang				10.000.000
	Rujukan Anak-anak terlantar				Jumlah anak terlantar yang dirujuk	5 orang				10.000.000
	Pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar				Jumlah anak terlantar yang dipantau	5 orang				10.000.000
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>						<b>Persentase Pengaduan yang ditindak lanjuti</b>	<b>100</b>	<b>244.360.520</b>	<b>276.473.546</b>
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/				Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang	2 kali			164.316.960	172.532.808

	Kota				dilakukan					
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)	1200 jiwa			57.859.880	60.752.874
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga				Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS	3500 KK			22.083.680	23.187.864
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti	2 kelompok			100.000	20.000.000
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>		<b>Persentase korban bencana yang tetangani</b>	<b>100</b>					<b>47.859.880</b>	<b>47.859.880</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>						<b>Persentase PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial</b>	<b>100</b>	<b>47.859.880</b>	<b>47.859.880</b>
	Penyediaan Makanan				Jumlah korban bencana yang diberikan makanan	20 kejadian			47.859.880	50.252.874
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi				Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian	8 orang			-	7.000.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan				Jumlah kelompok rentan yang dilayani	8 orang			-	12.000.000
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>		<b>Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan</b>	<b>100</b>					<b>30.047.870</b>	<b>31.550.264</b>
	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>						<b>Persentase terpeliharanya TMP Kusuma Bangsa dan</b>	<b>100</b>	<b>30.047.870</b>	<b>31.550.264</b>

							<b>Pejuang 45</b>			
	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab	2 lokasi			28.466.100	29.889.405
	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				Jumlah TMP yang diberikan pengamanan	2 lokasi			1.581.770	1.660.859

**USULAN PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL  
SUMBER DANA APBN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

Perangkat Daerah : Dinas Sosial

NO	PRIORITAS NASIONAL PROGRAM PRIORITAS KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	OUTPUT (PROYEK) K/L	PROGRAM K/L	KEGIATAN K/L	TARGET*	USULAN PAGU (Rp)	LOKASI		KET.
								PROVINSI	KAB/KOTA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>									
	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial</b>									
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga		Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi						5 Kecamatan Kota Payakumbuh	
2	<b>Program Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>									
	<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota</b>								Kota Payakumbuh	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		Jumlah Penerima Sembako yang masuk dalam DTKS							

## PENUTUP

Catatan Penting yang perlu mendapat perhatian :

- a. Program dan kegiatan yang disusun melebihi dari pagu sementara yang disediakan oleh karena urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar maka perlu diprioritaskan untuk pencapaian visi dan misi nasional, propinsi dan daerah sebagaimana yang telah disampaikan pada uraian sebelumnya
- b. Rencana Tindak lanjut

Program kegiatan yang disusun ini akan ditindak lanjuti sesuai dengan survey lapangan, proposal dari masyarakat serta situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan.

Demikian renja ini disampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Payakumbuh, Juli 2021

Kepala Dinas Sosial  
Kota Payakumbuh



**ERWAN, S.IP**

NIP. 19670310198903 1 005

**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022**

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Menjelaskan rumusan kinerja untuk Input, Output dan Outcomes dari kegiatan yang diselenggarakan	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
<b>Program :</b>								
Rehabilitasi Sosial	Masih banyak nya Lanjut Usia Terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih, Anak Terlantar yang berusia 5-18 tahun dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.	1). Dari aspek akses keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas baik Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masih terbatas 2). Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan 3). Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya 4). Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.	1). Masih belum mengerti nya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2). Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas masih banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya	Meningkatnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.	Menyediakan bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh	<b>Input :</b> Lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh  <b>Output :</b> Meningkatnya bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh  <b>Outcomes :</b> Tersedianya bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh	<b>Input :</b> Lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang dibantu sudah Responsif Gender  <b>Output :</b> Meningkatnya bantuan permakanan bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh  <b>Outcomes :</b> Banyaknya lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang terbantu permakannya sehingga dapat mengurangi biaya hidup sehari-hari
Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.								
Sub Kegiatan : Penyediaan Permakanan								
Tujuan : 1. Membantu memenuhi kebutuhan dasar berupa permakanan bagi lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti. 2. Meningkatkan kesejahteraan hidup lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti sehingga tidak lagi bergantung sepenuhnya pada keluarga/orang lain. 3. Memenuhi kewajiban pemerintah daerah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM).								

Payakumbuh, Maret 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



**GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2022**

KOLOM 1	KOLOM 2	KOLOM 3	KOLOM 4	KOLOM 5	KOLOM 6	KOLOM 7	KOLOM 8	KOLOM 9
Kebijakan / Program / Kegiatan / Tujuan	Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)	Isu Gender			Kebijakan Dan Rencana Aksi		Pengukuran Hasil	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Tolok Ukur Kinerja/Data Dasar Base Line	Target Kinerja/Indikator Gender
Ditulis kebijakan/program/kegiatan dan tujuan dari kegiatan	Data kuantitatif, kualitatif, hasil kegiatan tahun lalu (hasil evaluasi) dan data dasar atas isu gender yang ada	Rumusan masalah yaitu adanya kesenjangan (pada akses, kontrol, manfaat dan peran laki-laki dan perempuan)	Sebab kesenjangan yang datangnya dari dalam organisasi/SKPD	Sebab kesenjangan yang datangnya dari luar organisasi/SKPD	Apabila tujuan dalam kolom 1 belum responsif gender harus dirumuskan ulang responsif gender	Rumusan baru atas program atau kegiatan untuk mencapai tujuan	Menjelaskan rumusan kinerja untuk In put, Output dan Outcomes dari kegiatan yang diselenggarakan	Indikator capaian dan target kinerja responsif gender (Input, Output dan Outcomes)
<b>Program :</b>								
Rehabilitasi Sosial	Karena masih banyak nya anak putus sekolah yang ada di masyarakat maka perlu diadakan suatu bimbingan dan pelatihan bagi anak putus sekolah sehingga mereka bisa bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarga sehingga dapat menjadi modal bagi mereka untuk berusaha ditengah masyarakat.	1). Dari aspek akses keterlibatan anak terlantar /putus sekolah Perempuan dan Laki-Laki dalam pelatihan dan praktek belajar masih terbatas 2). Partisipasi yang ikut dalam pelatihan masih kurang 3). Dari aspek Kontrol masih terdapatnya kehadiran yang kurang dari peserta sehingga kurangnya ilmu yang diserap 4). Dari aspek Manfaat yang diharapkan dapat mendidik anak supaya mempunyai keterampilan dan bisa berusaha ditengah masyarakat	1). Masih belum mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan	1). Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender 2). Anak yang banyak dalam keluarga membuat banyak anak tidak mendapat jaminan hidup 3). Terbatasnya akses kepada masyarakat	Peningkatan pengetahuan dan keterampilan kerja anak terlantar /anak putus sekolah Perempuan dan Laki-Laki	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi Anak terlantar anak putus sekolah Laki-Laki dan Perempuan	<b>Input :</b> Anak-Anak Terlantar yang putus Sekolah <b>Output :</b> Meningkatnya pengetahuan Anak Terlantar /anak putus sekolah Laki-Laki dan Perempuan <b>Outcomes :</b> Terakomodirnya anak-anak terlantar anak putus sekolah dengan ilmu yang baru sehingga menjadi modal berusaha di masyarakat	<b>Input :</b> Anak yang ikut pelatihan sudah ada Responsif Gender <b>Output :</b> Meningkatnya keterampilan anak terlantar/anak putus sekolah <b>Outcomes :</b> Banyaknya anak terlantar Laki-Laki dan Perempuan yang berilmu sehingga dapat berusaha ditengah masyarakat
Kegiatan: Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial.								
Sub Kegiatan : Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial								
Tujuan : Terpenuhinya kebutuhan kebutuhan anak putus sekolah untuk mendapatkan keterampilan sebagai modal untuk menunjang kehidupannya di masa depan .								

Payakumbuh, Maret 2021  
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)**  
**PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

SKPD : Dinas Sosial Kota Payakumbuh  
TAHUN ANGGARAN : 2022

Program	Rehabilitasi Sosial		
Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Sub Kegiatan	Penyediaan Permakanan		
Kode kegiatan	1.06.04.2.01.01		
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Masih banyak nya Lanjut Usia Terlantar yang berusia 60 tahun atau lebih, Anak Terlantar yang berusia 5-18 tahun dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani dan sosialnya.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dari aspek akses keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas baik Perempuan dan Laki-Laki dalam memenuhi kebutuhan dasarnya masih terbatas</li> <li>2) Partisipasi dalam kegiatan ini tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan</li> <li>3) Dari aspek Kontrol kegiatan ini ditujukan untuk keterlibatan Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya</li> <li>4) Dari aspek Manfaat yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah lanjut usia terlantar, anak terlantar dan penyandang disabilitas di luar panti di Kota Payakumbuh yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.</li> </ol> <p>b. Penyebab Internal Masih belum mengerti nya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender</li> <li>2) Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Penyandang disabilitas masih banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya</li> </ol>		
Rencana Tindak	Kegiatan	Pemberian Bantuan berupa Bahan Makanan kepada Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas	
		Tujuan	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan makanan bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar dan disabilitas
		Aktivitas 1	Pemberian bantuan Bahan Makanan
		Sumber Daya/Input	a. Anak Terlantar sebanyak 5 (lima) orang b. Lanjut Usia Terlantar sebanyak 5 (lima) orang c. Disabilitas sebanyak 5 (lima) orang
		Output	Jumlah Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Disabilitas yang diberi bantuan permakanan

Sumber Dana	<i>Anggaran</i>	Rp. 75.083.520
	<i>SDM</i>	15 Orang (5 Laki-Laki dan 10 Perempuan)
Dampak / Hasil / Manfaat	Terpenuhinya kebutuhan dasar berupa bahan makanan bagi anak terlantar, lanjut usia terlantar dan disabilitas	

Payakumbuh, Maret 2021

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



ERWAN, S.IP

NIP 198703101989031005

**GENDER BUDGET STATEMENT (GBS)  
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER**

SKPD : Dinas Sosial Kota Payakumbuh  
TAHUN ANGGARAN : 2021

Program	Rehabilitasi Sosial		
Kegiatan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial		
Sub Kegiatan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial		
Kode kegiatan	1.06.04.2.01.06		
Analisis Situasi	<p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender). Karena masih banyaknya anak putus sekolah yang ada di masyarakat maka perlu diadakan suatu bimbingan dan pelatihan bagi anak putus sekolah sehingga mereka bisa bekerja memenuhi kebutuhan diri dan keluarga sehingga dapat menjadi modal bagi mereka untuk berusaha ditengah masyarakat.</p> <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dari aspek akses keterlibatan anak terlantar /putus sekolah Perempuan dan Laki-Laki dalam pelatihan dan praktek belajar masih terbatas</li> <li>2) Partisipasi yang ikut dalam pelatihan masih kurang</li> <li>3) Dari aspek Kontrol masih terdapatnya kehadiran yang kurang dari peserta sehingga kurangnya ilmu yang diserap</li> <li>4) Dari aspek Manfaat yang diharapkan dapat mendidik anak supaya mempunyai keterampilan dan bisa berusaha ditengah masyarakat</li> </ol> <p>b. Penyebab Internal Masih belum mengertinya tentang arti konsep gender dalam membuat program/kegiatan</p> <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang pengertian Gender</li> <li>2) Anak yang banyak dalam keluarga membuat banyak anak tidak mendapat jaminan hidup</li> <li>3) Terbatasnya akses kepada masyarakat</li> </ol>		
Rencana Tindak	Kegiatan	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial bagi Anak terlantar anak putus sekolah baik Laki-Laki maupun Perempuan	
		Tujuan	Anak Putus sekolah mendapatkan keterampilan sebagai modal untuk menunjang kehidupannya di masa depan.
		Aktivitas 1	Pengiriman Anak Ke Balai/Panti Sosial untuk mendapatkan Pelatihan Keterampilan
		Sumber Daya/Input	a. Anak Terlantar / Putus Sekolah sebanyak 5 orang baik Perempuan maupun laki-laki b. Modul pelatihan keterampilan
		Output	Jumlah Anak Terlantar/Putus sekolah yang difasilitasi/dikirim untuk mengikuti pelatihan keterampilan
Sumber Dana	Anggaran	Rp. 7.758.320,-	
	SDM	5 Orang baik Perempuan maupun laki-laki	

Dampak / Hasil / Manfaat	Meningkatnya kemampuan/skill anak putus sekolah sehingga dapat menunjang masa depan mereka
--------------------------------	--

Payakumbuh, Maret 2021  
KEPALA DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



**Rencana Kinerja Tahunan (RKT)**  
**Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2021**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis sata terpadu (BDT)/ Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	0,80%
2. Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Hasil Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial oleh Inspektorat	A
3. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	a. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	65%
	b. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,90%

Payakumbuh, Januari 2021  
Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh



**ERWAN, S.IP**

NIP. 19670310198903 1 004

# CASCADING DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH 2021

KEPALA DINAS		
<b>Sasaran :</b>	<b>Indikator :</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya kemandirian PMKS	Persentase RTS ( Rumah tangga Sasaran ) yang keluar dari basis data terpadu	0.80%
Meningkatnya pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos	65%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99.90%
	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	A
<b>Program/ Kegiatan</b>		<b>Anggaran</b>
Proram Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp3,004,514,337
Program Pemberdayaan Sosial		Rp234,635,820
Program Rehabilitasi Sosial		Rp563,886,180
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Rp5,499,999,910
Program Penanganan Bencana		Rp102,218,680
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		Rp31,523,770
		Rp9,436,778,697

KABID PERLINDUNGAN, REHABILITASI DAN JAMINAN SOSIAL		
SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya Penanganan PMKS	Persentase PMKS yang tertangani	35%
Meningkatnya Penanganan Kemiskinan Terpadu	Persentase RTS yang telah diintervensi	80%
Meningkatnya kualitas Pelayanan Dinas Sosial	Nilai IKM	90
<b>PROGRAM :</b>		
	<b>ANGGARAN</b>	
	RP 563,886,180	
Program Perlindungan dan Jaminan sosial	RP 5,499,999,910	
Program Penanganan Bencana	RP 102,218,680	
	<b>RP 6,166,104,770</b>	

KEPALA SEKSI JAMINAN SOSIAL		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Jaminan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat PKH	40%
	Persentase PMKS yang mendapat Program Sembako	40%
	<b>Anggaran</b>	
Kegiatan / Sub Kegiatan		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	RP 92.859.880	
Pemberian Layanan Rujukan	RP 92.859.880	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza diluar Panti Sosial	RP 184.592.430	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	RP 184.592.430	
	<b>RP 277.452.310</b>	

PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data penerima jaminan sosial	Jumlah data PMKS penerima PKH yang dikelola	
	Jumlah data PMKS penerima Program Sembako yang dikelola	

KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan	100%
Meningkatnya Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	40%
	<b>Anggaran</b>	
Kegiatan / Sub Kegiatan		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial	Rp164,316,960	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Rp164,316,960	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp5,499,999,910	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp5,499,999,910	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/ Kota	Rp102,218,680	
Penyediaan Makanan	Rp86,818,380	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp5,400,300	
Penanganan Khusus bagi kelompok Rentan	Rp10,000,000	
	<b>Rp5,766,535,550</b>	

ANALIS BENCANA		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data PMKS penerima perlindungan sosial	Jumlah kegiatan lapangan dalam rangka menyeleksi penerima bantuan, penyerahan bantuan social dan monitoring penerima bantuan	
	Jumlah kegiatan lapangan dalam rangka menyeleksi penerima bantuan, penyerahan bantuan social dan monitoring penerima bantuan	

KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapat bantuan permakanan	
	Persentase PMKS yang mendapat layanan reunifikasi/ penelusuran keluarga	
	Persentase PMKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	
	<b>Anggaran</b>	
Kegiatan / Sub Kegiatan		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial		
Penyediaan Permakanan	Rp75,083,410	
Pemberiaan Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Rp6,491,470	
Pemberiaan Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Rp7,758,010	
Pemberiaan Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Rp16,511,790	
Pemberiaan Pelayanan Penelusuran Keluarga	Rp16,271,830	

PENGELOLA REHABILITASI SOSIAL		
Sasaran	Indikator	Target
Meningkatnya ketersediaan data PMKS penerima rehabilitasi sosial	Jumlah data PMKS yang menerima bantuan permakanan	
	Jumlah data PMKS yang menerima layanan reunifikasi/ penelusuran keluarga	
	Jumlah data PMKS yang mendapat bimbingan fisik, mental, spritual dan sosial	

SEKRETARIS		
<b>SASARAN :</b>	<b>INDIKATOR :</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas Sosial	Nilai IKM	90
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan	Persentase penyerapan anggaran	89%
	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	100%
<b>Program/ Kegiatan :</b>		<b>Anggaran</b>
Program Penujangan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp689,849,589

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
<b>SASARAN :</b>	<b>INDIKATOR :</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya kualitas Sarana dan prasarana perkantoran	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam keadaan baik	90%
Meningkatnya Pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase dokumen kepegawaian yang lengkap	95%
Meningkatnya kualitas SDM Dinas Sosial	Persentase pemenuhan ASN dalam Perangkat Daerah sesuai dengan Angka dan AMK	90%
<b>Kegiatan/ Sub Kegiatan :</b>		<b>Anggaran</b>
<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>63,038,420</b>
01. Penyusunan Rencana dan Renja Perangkat Daerah		57,955,670
02. Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan		3,984,240
03. Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah		1,998,510
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>168,260,925</b>
01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		3,523,300
04. Penyediaan Bahan Logistik Kantor		29,243,925
05. Penyediaan Barang Cetak dan Penggunaan		13,150,750
06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		4,090,950
08. Fasilitas Kunjungan Tamu		2,100,000
09. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		11,612,400
<b>Penyediaan Jasa Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>305,220,244</b>
01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1,540,000
02. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		107,96,920
04. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		292,863,324
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penujangan Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>153,330,000</b>
01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		39,190,000
02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perorangan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		105,750,000
06. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		8,390,000

KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN		
<b>SASARAN :</b>	<b>INDIKATOR :</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya kelengkapan dokumen perencanaan	Persentase dokumen perencanaan yang tersedia	100%
Meningkatnya kualitas pelaksanaan program kegiatan	Persentase dokumen pelaporan yang tersedia	100%
	Persentase capaian kinerja program/kegiatan	95%

BENDAHARA		
<b>SASARAN :</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja Dinas Sosial	Jumlah Data capaian kinerja program/ kegiatan Dinas Sosial yang dibuat/ dihimpen	100 dokumen

PENTUSUN LAPORAN KEUANGAN		
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya ketersediaan data capaian kinerja Dinas Sosial	Jumlah data keuangan yang dibuat dan dihimpen	1200 dokumen

PENGADMINISTRASI PERSUKATAN		
<b>SASARAN :</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya ketersediaan data administrasi kepegawaian	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang dibuat/ dihimpen	1500 berkas

KABID PEMBERDAYAAN SOSIAL		
<b>SASARAN :</b>	<b>Indikator</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya Kualitas PSKS	Persentase Tenaga PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS	90%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dinas Sosial	Nilai IKM	90
<b>PROGRAM :</b>	<b>ANGGARAN</b>	
1. Program Pemberdayaan Sosial	Rp234,635,820	
2. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp31,523,770	
	Rp266,159,590	

KEPALA SEKSI KEPAHLAWANAN, KESETIAKAWANAN SOSIAL DAN RESTORASI SOSIAL		
<b>SASARAN :</b>	<b>Indikator</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya Nilai-nilai kepahlawanan	Persentase kegiatan hari besar kepahlawanan yang dilaksanakan	95%
Meningkatnya Kesetiakawanan Sosial	Persentase kegiatan kesetiakawanan sosial yang dilaksanakan	95%
<b>Kegiatan/ Sub Kegiatan</b>	<b>ANGGARAN</b>	
<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp31,523,770</b>	
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp29,942,000	
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp1,581,770	

KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL, KELUARGA DAN MASYARAKAT		
<b>Sasaran:</b>	<b>Indikator</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya Penguatan kelembagaan PSKS	Persentase PSKS yang memiliki legal aspek	95%
	Persentase LKS yang aktif dalam LKKS	95%
Meningkatnya Kapasitas SDM PSKS	Persentase Karang Taruna yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas	95%
<b>Kegiatan/ Sub Kegiatan :</b>	<b>ANGGARAN</b>	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Cakupan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp116,008,480</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp50,461,480	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp50,461,480	
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Rp15,085,520	

KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAN PENGAWASAN		
<b>SASARAN :</b>	<b>Indikator</b>	<b>TARGET</b>
Meningkatnya Kapasitas SDM PSKS	Persentase TKSK dan PSM yang telah mengikuti latihan lanjutan	95%
Meningkatnya jaringan kerja dan fasilitas PSKS	Persentase kerjasama PSKS dalam penanganan PMKS	95%
<b>Kegiatan/ Sub Kegiatan :</b>	<b>ANGGARAN</b>	
<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Cakupan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Rp143,537,310</b>	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp138,631,990	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp4,905,320	

PENYUSUN PROGRAM PEMBINAAN PRANATA SOSIAL		
<b>Sasaran</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya pelaksanaan hari besar kepahlawanan	Jumlah kegiatan upacara hari pahlawan, anjingsana dan sarasehan yang dilaksanakan	1 kegiatan
Meningkatnya pemeliharaan makam pahlawan	Jumlah kegiatan TMP yg dipelihara	1 kegiatan
	Jumlah makam pejuang 45 yang dipelihara	1 kegiatan

ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL		
<b>Sasaran :</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya legal aspek kelembagaan PSKS	Jumlah PSKS yang memiliki legal aspek	
Meningkatnya pengawasan PSKS	Jumlah PSKS yang dievaluasi	

PENGADMINISTRASI UMUM		
<b>Sasaran :</b>	<b>Indikator :</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya Pembinaan kapasitas PSKS	Jumlahkegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas PSM dan TKSK yang dilakukan	2 kegiatan

ANALIS PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN MASALAH SOSIAL		
<b>Sasaran :</b>	<b>Indikator :</b>	<b>Target</b>
Meningkatnya ketersediaan dan fasilitas PSKS dalam penanganan PMKS	Jumlah jaringan kerja PSKS yang tersedia	
	Jumlah fasilitas PSKS yang tersedia	